



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom
Jabatan : BUPATI BALANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025


Pihak Kedua
H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom


Pihak Pertama,
NOOR ASPARIAH, SP, MP
NIP.19660613 199802 2 003


LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Menurunya Pelanggaran Perda	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti	100%
	Menurunya Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan Jumlah Gangguan Trantibum	10%

No	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.822.100.512
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp. 10.396.265.284
	JUMLAH	Rp . 20.218.365.796

Paringin, Januari 2025


H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom


NOOR ASPARIAH SP, MP
NIP.19660613 199802 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,

HEDY MULYAWAN, M.Pd
NIP. 19681205 199002 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum	750 Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.214.347.312

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,



HEDY MULYAWAN, M.Pd
NIP. 19681205 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAISAL NOORHADI,ST

Jabatan : Kepala Bidang Peraturan Perundang Undangan Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,

FAISAL NOORHADI, ST
NIP. 19830302 200803 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG PENEGAKKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Perda	Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 607.119.900
	JUMLAH	Rp. 607.119.900

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,



FAISAL NOORHADI, ST
NIP. 19830302 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTHFIYADI,S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,

LUTHFIYADI, S.Sos
NIP. 19670616 200701 1 036

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlinmas	Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 547.364.300

JUMLAH Rp. 547.364.300

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,



LUTHFIYADI, S.Sos
NIP. 19670616 200701 1 036



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARNI, S.Ag. MM

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,

ARNI, S.Ag. MM
NIP. 19681213 198911 1 002

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / SEKRETARIS

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakib)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakib)	76,40

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 322.262.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.591.881.684
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 453.300.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 409.482.300
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 201.307.700
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 135.162.400
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 282.869.200
	JUMLAH	Rp.10.396.265.284

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,



ARNI, S.Ag. MM
NIP. 19681213 198911 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
APARATUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAIFULLAH, SP

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,

SYAIFULLAH, SP
NIP. 19711017 200112 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KEPALA BIDANG SUMBERDAYA
APARATUR

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SDM Satpol PP yang Tangguh	Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	80 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.453.269.000
	JUMLAH	Rp. 453.269.000

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



NOOR ASPARIAH, SP. MP
NIP.19660613 199802 2 003

Pihak Pertama,



SYAIFULLAH, SP
NIP. 19711017 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MILA HAYATI, S.Pd

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARNI, S.Ag. MM

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

ARNI, S.Ag. MM

NIP. 19681213 198911 1 002

Pihak Pertama,

MILA HAYATI, S.Pd

NIP. 19800803 200801 2 027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 130.280.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 57.232.500
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 87.200.000
4.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp. 29.808.500
5.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp. 17.741.000
JUMLAH		Rp. 322.262.000

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



ARNI, S.Ag. MM
NIP. 19681213 198911 1 002

Pihak Pertama,



MILA HAYATI, S.Pd
NIP. 19800803 200801 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG WIJONARKO, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARNI, S.Ag. MM

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

ARNI, S.Ag. MM
NIP. 19681213 198911 1 002

Pihak Pertama,

BAMBANG WIJONARKO, S.Sos
NIP. 19810326 201001 1 007

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG KEUANGAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.591.881.684

JUMLAH Rp. 8.591.881.684

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua


ARNI, S.Ag. MM
NIP. 19681213 198911 1 002

Pihak Pertama,


BAMBANG WIJONARKO, S.Sos
NIP. 19810326 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSTAFA FAHMI, S. Kom. M.IP

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARNI, S.Pd. MM

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

ARNI, S.Ag. MM

NIP. 19681213 198911 1 002

Pihak Pertama,

MUSTAFA FAHMI, S.Kom

NIP. 19850611 201001 1 005

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 453.300.000
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 409.482.300
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 201.307.700
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 135.162.400

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 282.869.200

JUMLAH

Rp. 1.482.121.600

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



ARNI, S.Ag. MM

NIP. 19681213 198911 1 002

Pihak Pertama,



MUSTAFA FAHMI, S.Kom

NIP. 19850611 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
TRANTIBUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRHAM MAHFUZ, S. Sos

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

HEDY MULYAWAN, S.Pd
NIP. 19681205 199002 1 001

Pihak Pertama,

IRHAM MAHFUZ, S.Sos
NIP. 19690317 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Dukungan Kerjasama SKPD Pengampu Perda dalam enanganan Trantibum	persentase dukungan kerjasama KPD engampu Perda	80%

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Rp. 88.455.000

JUMLAH

Rp. 88.455.000,-

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



HEDY MULYAWAN, S.Pd
NIP. 19681205 199002 1 001

Pihak Pertama,



IRHAM MAHEUZ, S.Sos
NIP. 19690317 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
TRANTIBUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANSARI ASTAMI,A.Md

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

HEDY MULYAWAN, M.Pd
NIP. 18681205 199002 1 001

Pihak Pertama,

ANSARI ASTAMI,A.Md
NIP. 19861221 200904 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya mekanisme penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjuti	55 Kasus

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 7.318.672.612
2.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 807.219.700
	JUMLAH	Rp. 8.125,892.312

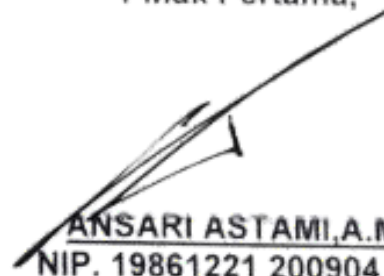
Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



HEDY MULYAWAN, M.Pd
NIP. 18681205 199002 1 001

Pihak Pertama,



ANSARI ASTAMI, A.Md
NIP. 19861221 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
LINMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUDINNOOR,A.Md

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTHFIYADI,S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

LUTHFIYADI,S.Sos
NIP. 19670616 200701 1 036

Pihak Pertama,

SYAMSUDINNOOR, A.Md
NIP. 19720925 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	2355 Orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 547.364.300,
	JUMLAH	Rp. 547.364.300,

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



LUTHFIYADI, S.Sos
NIP. 19670616 200701 1 036

Pihak Pertama,



SYAMSUDINNOOR, A.Md
NIP. 19720925 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERDY SYAFTIAWAN, SH

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISAL NOORHADI,ST

Jabatan : Kepala Bidang Peraturan Perundang undangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

FAISAL NOORHADI,ST
NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama,

FERDY SYAFTIAWAN,SH
NIP. 19831007 201001 1 018

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan	24 Perda
2	Meningkatnya hasil tindak lanjut terhadap hasil temuan Meningkatkan hasil tindak lanjut terhadap hasil temuan	Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan	10 Pelanggaran

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Rp. 199.719.900
2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 407.400.000
JUMLAH		Rp. 607.119.900

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



FAISAL NOORHADI,ST
NIP. 49830302 200803 1 001

Pihak Pertama,



FERDY SYAFTIAWAN,SH
NIP. 19831007 201001 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERLINA AMIANI, S.Sos, MM

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, SP

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

FAISAL NOORHADI, ST
NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama,

FERDY SYAFTIAWAN, SH
NIP. 19831007 201001 1 018

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan kepada anggota Pol PP sesuai standar kompetensi	Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi	20 Orang

Paringin, Januri 2024

Pihak Kedua



FAISAL NOORHADI,ST
NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama,



FERDY SYAFTIAWAN,SH
NIP. 19831007 201001 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARKANI,S.Pd

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTHFIYADI,S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

LUTHFIYADI, S.Sos
NIP. 19670616 200701 1 036

Pihak Pertama,

SARKANI, S.Pd
NIP. 19760815 200604 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	2355 Orang

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



LUTHFIYADI, S.Sos
NIP. 19670616 200701 1 036

Pihak Pertama,



SARKANI, S.Pd
NIP. 19760815 200604 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
SUMBER DAYA APARATUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERLINA AMIANI, S.Sos, MM

Jabatan : JF Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, SP

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

SYAIFULLAH, SP
NIP. 19711017 200112 1 001

Pihak Pertama,

HERLINA AMIANI, S.Sos, MM
NIP. 19830713 201001 2 015

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / JF POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan kepada anggota Pol PP sesuai standar kompetensi	Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi	20 Orang

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



SYAIFULLAH, SP
NIP. 19711017 200112 1 001

Pihak Pertama,



HERLINA AMIANI, S.Sos, MM
NIP. 19830713 201001 2 015

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	SKPD
2	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	SKPD
3	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	SKPD
4	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar	SKPD
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	SKPD
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	SKPD

Kepala Sub Bagian Keuangan



BAMBANG WIJONARTO, S.SOS

Penata TK. I / III d

NIP. 19810326 201001 1 007

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



M. NOOR IFANSYAH, SE

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 19860429 202012 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. NOOR IFANSYAH, S.E

Jabatan : Penelaah Tehnis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG WIJONARKO, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

BAMBANG WIJONARKO, S.Sos

Penata TK. I / III d

NIP. 19810326 201001 1 007

Pihak Pertama

M. NOOR IFANSYAH, S. E

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 19860429 202012 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Dokumen	24
2.	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Dokumen	24
3.	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
4.	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	24

Paringin, Januari 2025

Kepala Sub Bagian Keuangan

Penelaah Teknis Kebijakan




BAMBANG WIJONARTO, S.SOS

M. NOOR IFANSYAH, SE

Penata TK. I / III d

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 19810326 201001 1 007

NIP. 19860429 202012 1 006

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	SKPD
2	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	SKPD
3	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	SKPD
4	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar	SKPD
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	SKPD
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	SKPD

Kepala Sub Bagian Keuangan



BAMBANG WIJONARTO, S.SOS

Penata TK. I / III d

NIP. 19810326 201001 1 007

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



HENDRI RIFANI, S.AP.

Penata Muda / III a

NIP. 19820607 200701 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRI RIFANI, S.AP
Jabatan : Penelaah Tehnis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG WIJONARKO, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

BAMBANG WIJONARKO, S.Sos
Penata TK. I / III d
NIP. 19810326 201001 1 007

Pihak Pertama

HENDRI RIFANI, S.AP.
Penata Muda / III a
NIP. 19820607 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Dokumen	24
2.	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Dokumen	24
3.	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
4.	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	24

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan

Kepala Sub Bagian Keuangan



BAMBANG WIJONARTO, S.SOS

Penata TK. I / III d

NIP. 19810326 201001 1 007



HENDRI RIFANI, S.AP.

Penata Muda / III a

NIP. 19820607 200701 1 006

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	Jumlah menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	Jumlah menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	SKPD
2	Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Jumlah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Jumlah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	SKPD
3	Mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	Jumlah mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	Jumlah mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	SKPD
4	Mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	Jumlah mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	Jumlah mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	SKPD
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	SKPD
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	SKPD

Kepala Sub Bagian Keuangan



BAMBANG WIJONARTO, S.SOS

Penata TK. I / III d

NIP. 19810326 201001 1 007

Paringin, Januari 2025

Pengadministrasi Perkantoran



MISBAH

Pengatur / II a

NIP 19770506 201406 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISBAH
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG WIJONARKO, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

BAMBANG WIJONARKO, S.Sos
Penata TK. I / III d
NIP. 19810326 201001 1 007

Pihak Pertama

MISBAH
Pengatur / II a
NIP. 19770506 201406 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN BIDANG SEKRETARIAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	Jumlah menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	Dokumen	24
2.	Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Jumlah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Daftar Nominatif	24
3.	Mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	Jumlah mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	Dokumentasi	24
4.	Mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	Jumlah mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	Dokumen	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	6

Kepala Sub Bagian Keuangan



BAMBANG WIJONARTO, S.SOS

Penata TK. I / III d

NIP. 19810326 201001 1 007

Paringin, Januari 2025

Pengadministrasi Perkantoran



MISBAH

Pengatur / II a

NIP 19770506 201406 1 005

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	SKPD
2	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	SKPD
3	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	SKPD
4	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar	SKPD
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	SKPD
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	SKPD

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan



MILA HAYATI, S.Pd

Penata / III c

NIP. 19800803 200801 2 027

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



YUSFI NOOR AFYUDIN

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 198010162007011006



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSFI NOOR AFYUDIN, S.Pi

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MILA HAYATI, S.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pencanaan dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parangin, Januari 2025

Pihak Kedua

MILA HAYATI, S.Pd

Penata / III c

NIP. 19800803 200801 2 027

Pihak Pertama

YUSFI NOOR AFYUDIN, S.Pi

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 198010162007011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Dokumen	24
2.	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Dokumen	24
3.	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
4.	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	24

Paringin, Januari 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

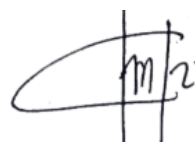
Penelaah Teknis Kebijakan



MILA HAYATI, S.Pd

Penata / III c

NIP. 19800803 200801 2 027



YUSFI NOOR AFYUDIN, S.Pi

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 198010162007011006

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	SKPD
2	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	SKPD
3	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	SKPD
4	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar	SKPD
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	SKPD
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	SKPD

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.I.P
Penata / III c
NIP. 19850611 201001 1 015

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



DODY IRAWAN, S.SOS, MM.
Penata Muda TK. I / III b
NIP. 19870125 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DODY IRAWAN, S.SOS, MM.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.IP

Penata / III c

NIP. 19850611 201001 1 015

DODY IRAWAN, S.SOS, MM

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 19870125 200604 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Dokumen	24
2.	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Dokumen	24
3.	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
4.	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	24

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.I.P

Penata / III c

NIP. 19850611 201001 1 015


DODY IRAWAN, S.SOS, MM

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 19870125 200604 1 004

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	Jumlah menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	Jumlah menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	SKPD
2	Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Jumlah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Jumlah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	SKPD
3	Mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	Jumlah mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	Jumlah mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	SKPD
4	Mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	Jumlah mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	Jumlah mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	SKPD
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	SKPD
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	SKPD

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.I.P
Penata / III c
NIP. 19850611 201001 1 015

Paringin, Januari 2025
Pengadministrasi Perkantoran



HADI WIRANTO
Penata Muda / III a
NIP. 19830510 200701 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADI WIRANTO
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.IP
Penata / III c
NIP. 19850611 201001 1 015

Pihak Pertama

HADI WIRANTO
Penata Muda / III a
NIP. 19830510 200701 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN BIDANG SEKRETARIAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

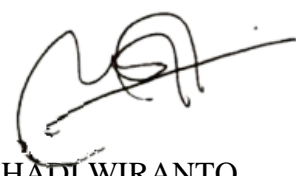
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	Jumlah menyiapkan bahan-bahan kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;	Dokumen	24
2.	Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Jumlah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemerintahan atau pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Daftar Nominatif	24
3.	Mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	Jumlah mendokumentasikan surat/file/barang/kegiatan pelayanan sesuai dengan pengkodean, tata naskah dan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pencarian bilamana diperlukan;	Dokumentasi	24
4.	Mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	Jumlah mengetik surat/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;	Dokumen	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	6

Paringin, Januari 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pengadministrasian Perkantoran


MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.I.P
Penata / III c
NIP. 19850611 201001 1 015


HADI WIRANTO
Penata Muda / III a
NIP. 19830510 200701 1 003

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
ARSIPARIS TERAMPIL PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
2. Jabatan : Arsiparis Terampil
3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melaksanakan Identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah pertimbangan JRA	Jumlah melaksanakan Identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah pertimbangan JRA	Jumlah melaksanakan Identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah pertimbangan JRA	SKPD
2	Melakukan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan	Jumlah melakukan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan	Jumlah melakukan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan	SKPD
3	Melakukan identifikasi khazanah dan menyusun rencana teknis pada kegiatan penyusunan inventarisasi arsip statis	Jumlah melakukan identifikasi khazanah dan menyusun rencana teknis pada kegiatan penyusunan inventarisasi arsip statis	Jumlah melakukan identifikasi khazanah dan menyusun rencana teknis pada kegiatan penyusunan inventarisasi arsip statis	SKPD
4	Menyusun Skema Sementara Dalam Rangka Penyusunan Inventaris	Jumlah menyusun Skema Sementara Dalam Rangka Penyusunan Inventaris	Jumlah menyusun Skema Sementara Dalam Rangka Penyusunan Inventaris	SKPD
5	Melakukan Penulisan Inventaris, Uji Petik dan Perbaikan Hasil Uji Petik Pada Kegiatan Penyusunan Inventaris Arsip Statis	Jumlah melakukan Penulisan Inventaris, Uji Petik dan Perbaikan Hasil Uji Petik Pada Kegiatan Penyusunan Inventaris Arsip Statis	Jumlah melakukan Penulisan Inventaris, Uji Petik dan Perbaikan Hasil Uji Petik Pada Kegiatan Penyusunan Inventaris Arsip Statis	SKPD
6	Menilai naskah sumber arsip dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah menilai naskah sumber arsip dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah menilai naskah sumber arsip dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip	SKPD
7	Memberikan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) penyelenggaraan kearsipan	Jumlah memberikan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) penyelenggaraan kearsipan	Jumlah memberikan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) penyelenggaraan kearsipan	SKPD
8	Melaksanakan Tugas Kedinasan yang Diberikan Pimpinan	Jumlah melaksanakan Tugas Kedinasan yang Diberikan Pimpinan	Jumlah melaksanakan Tugas Kedinasan yang Diberikan Pimpinan	SKPD

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.I.P
Penata / III c
NIP. 19850611 201001 1 015

Paringin, Januari 2025

Arsiparis Terampil



NORZAKIYAH, A.Md
Pengatur / VII
NIP. 19920321 202421 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORZAKIYAH, A.Md

Jabatan : Arsiparis Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parangin, Januari 2025

Pihak Kedua

MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.IP

Penata / III c

NIP. 19850611 201001 1 015

Pihak Pertama

NORZAKIYAH, A.Md

Pengatur / VII

NIP. 19920321 202421 2 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mendoku Melaksanakan Identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah pertimbangan JRA	Jumlah mendoku Melaksanakan Identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah pertimbangan JRA	Dokumen	200
2.	Melakukan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan	Jumlah melakukan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan	Kegiatan	200
3.	Melakukan identifikasi khazanah dan menyusun rencana teknis pada kegiatan penyusunan inventarisasi arsip statis	Jumlah melakukan identifikasi khazanah dan menyusun rencana teknis pada kegiatan penyusunan inventarisasi arsip statis	Dokumen	12
4.	Melakukan Penulisan Inventaris, Uji Petik dan Perbaikan Hasil Uji Petik Pada Kegiatan Penyusunan Inventaris Arsip Statis	Jumlah melakukan Penulisan Inventaris, Uji Petik dan Perbaikan Hasil Uji Petik Pada Kegiatan Penyusunan Inventaris Arsip Statis	Dokumen	12
5.	Melakukan Penulisan Inventaris, Uji Petik dan Perbaikan Hasil Uji Petik Pada Kegiatan Penyusunan Inventaris Arsip Statis	Jumlah melakukan Penulisan Inventaris, Uji Petik dan Perbaikan Hasil Uji Petik Pada Kegiatan Penyusunan Inventaris Arsip Statis	Dokumen	12
6.	Memberikan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) penyelenggaraan kearsipan	Jumlah memberikan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) penyelenggaraan kearsipan	Kegiatan	240

Paringin, Januari 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Arsiparis Terampil


MUSTAFA FAHMI, S.Kom, M.I.P
Penata / III c
NIP. 19850611 201001 1 015


NORZAKIYAH, A.Md
Pengatur / VII
NIP. 19920321 202421 2 002

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data;	SKPD
2	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	SKPD
3	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	SKPD
4	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	SKPD
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	SKPD
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	SKPD

Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah



FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



RAHMADI, S.SOS
Penata / III c
NIP. 19670811 198602 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMADI, S.SOS
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISAL NOORHADI, ST.
Jabatan : Kepala Bidang Perundang – Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama

RAHMADI, S.SOS
Penata / III c
NIP. 19670811 198602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
BIDANG PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Dokumen	24
2.	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Dokumen	24
3.	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
4.	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	24

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah

Penelaah Teknis Kebijakan

FAISAL NOORHADI, ST.

Pembina / IV a

NIP. 19830302 200803 1 001

RAHMADI, S.SOS

Penata / III c

NIP. 19670811 198602 1 001

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
AHLI PERTAMA – POLISI PAMONG PRAJA PADA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
2. Jabatan : Ahli Pertama – Polisi Pamong Praja
3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	SKPD
2	Melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	SKPD
3	Menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	SKPD
4	Menyiapkan bahan pembuatan rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan	Jumlah menyiapkan bahan pembuatan rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan	Jumlah menyiapkan bahan pembuatan rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan	SKPD

	trantibum linmas berjalan dengan baik	trantibum linmas berjalan dengan baik	trantibum linmas berjalan dengan baik	
5	Melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik	Jumlah melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik	Jumlah melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik	SKPD
6	Melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga	Jumlah melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga	Jumlah melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga	SKPD
7	Melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis	Jumlah melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis	Jumlah melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis	SKPD
8	Melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik	Jumlah melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik	Jumlah melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik	SKPD
9	Menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	Jumlah menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	Jumlah menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	SKPD

Paringin, Januari 2025

Ahli Pertama Polisi Pamong Praja

Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah

FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

DEKY FREMMUZAR, S.H.
Penata Muda / III a
NIP. 19980813 202202 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEKY FREMMUZAR, S.H.
Jabatan : Ahli Pertama – Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISAL NOORHADI, ST.
Jabatan : Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang – Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama

DEKY FREMMUZAR, S.H.
Penata Muda / III a
NIP. 19980813 202202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
AHLI PERTAMA POLISI PAMONG PRAJA
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan produk hukum daerah	Jumlah menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan produk hukum daerah	Surat Perintah	15
2.	Melaksanakan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah melaksanakan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Surat Perintah	25
3.	Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.	Jumlah menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.	Laporan	12
4.	Menghadiri rapat internal Satpol PP	Jumlah menghadiri rapat internal Satpol PP	Pertemuan	20
5.	Melakukan pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	Jumlah melakukan pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	Surat Perintah	25

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah

Ahli Pertama


FAISAL NOORHADI, ST

Pembina (IV/A)
NIP. 198303022008031001


DEKY FREMMUZAR, S.H

Penata Muda (III/a)
NIP. 199808132022021001

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD

10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD
11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Parangin, Januari 2025

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah



FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Pranata Trantibum



SAMAN
Penata Muda / III a
NIP. 19680430 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMAN

Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISAL NOORHADI, ST.

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parangin, Januari 2025

Pihak Kedua

FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama

SAMAN
Penata Muda / III a
NIP. 19680430 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG PENEGAKKAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Parangin, Januari 2025

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah



FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Pranata Trantibum



SAMAN
Penata Muda / III a
NIP. 19680430 200604 1 011

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD

10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD
11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah

FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Pranata Trantibum

AHMAD YAZID
Penata Muda / III a
NIP. 19670820 200701 1 036



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD YAZID

Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISAL NOORHADI, ST.

Jabatan : Kepala Bidang Perundang – Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

FAISAL NOORHADI, ST.

Pembina / IV a

NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama

AHMAD YAZID

Penata Muda / III a

NIP. 19670820 200701 1 036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG PENEGAKKAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah



FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Pranata Trantibum



AHMAD YAZID
Penata Muda / III a
NIP. 19670820 200701 1 036

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD
10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD

11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah



FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Pranata Trantibum



AKHMAD BAYUNI
Pengatur Muda TK. I / II c
NIP. 19701202 200701 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD BAYUNI

Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISAL NOORHADI, ST.

Jabatan : Kepala Bidang Perundang – Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parangin, Januari 2025

Pihak Kedua

FAISAL NOORHADI, ST.

Pembina / IV a

NIP. 19830302 200803 1 001

Pihak Pertama

AHMAD BAYUNI

Pengatur Muda TK. I / II c

NIP. 19701202 200701 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG PENEGAKKAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah



FAISAL NOORHADI, ST.
Pembina / IV a
NIP. 19830302 200803 1 001

Paringin, Januari 2025

Pranata Trantibum



AKHMAD BAYUNI
Pengatur Muda TK. I / II c
NIP. 19701202 200701 1 015

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
AHLI PERTAMA-POLISI PAMONG PRAJA PADA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	SKPD
2	Melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	SKPD
3	Menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	SKPD
4	Menyiapkan bahan pembuatan rencana	Jumlah menyiapkan bahan pembuatan	Jumlah menyiapkan bahan pembuatan	SKPD

	<p>induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	<p>rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	<p>rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	
5	<p>Melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	SKPD
6	<p>Melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	<p>Jumlah melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	<p>Jumlah melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	SKPD
7	<p>Melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	<p>Jumlah melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	<p>Jumlah melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	SKPD
8	<p>Melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	SKPD
9	<p>Menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta</p>	<p>Jumlah menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan</p>	<p>Jumlah menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta</p>	SKPD

	menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	
--	---	--	---	--

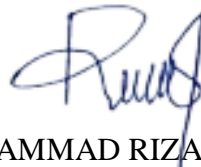
Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001

Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja



MUHAMMAD RIZALDI, S.H.
Penata Muda / III a
NIP. 19930610 202202 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZALDI, S.H

Jabatan : Ahli Pertama Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HEDY MULYAWAN, M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 19681205 199002 1 001

Paringin, Januari 2025

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZALDI, S.H

Penata Muda / III a

NIP. 19930610 202202 1 001

PERJANJIAN KINERJA
AHLI PERTAMA-POLISI PAMONG PRAJA
PADA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan kegiatan Patroli Pengaman dan pengawalan pejabat / Tamu Pejabat	Jumlah melakukan kegiatan Patroli Pengaman dan pengawalan pejabat / Tamu Pejabat	Surat Perintah	480
2.	Melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Surat Tugas	60
3.	Menghadiri rapat internal Satpol PP	Jumlah menghadiri rapat internal Satpol PP	Pertemuan	40
4.	Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Laporan	450
5.	Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Laporan	90

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001

Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja



MUHAMMAD RIZALDI, S.H.
Penata Muda / III a
NIP. 19930610 202202 1 001

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
AHLI PERTAMA-POLISI PAMONG PRAJA PADA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	SKPD
2	Melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	SKPD
3	Menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	SKPD
4	Menyiapkan bahan pembuatan rencana	Jumlah menyiapkan bahan pembuatan	Jumlah menyiapkan bahan pembuatan	SKPD

	<p>induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	<p>rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	<p>rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	
5	<p>Melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	SKPD
6	<p>Melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	<p>Jumlah melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	<p>Jumlah melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	SKPD
7	<p>Melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	<p>Jumlah melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	<p>Jumlah melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	SKPD
8	<p>Melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	SKPD
9	<p>Menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta</p>	<p>Jumlah menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan</p>	<p>Jumlah menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta</p>	SKPD

	menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	
--	---	--	---	--

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001

Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja



NINA RAHMAIDA, S.I.P
Penata Muda / III a
NIP. 19960426 202202 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NINA RAHMAIDA, S.IP
Jabatan : Ahli Pertama Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001

Parangin, Januari 2025

Pihak Pertama

NINA RAHMAIDA, S.IP
Penata Muda / III a
NIP. 19960426 202202 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
AHLI PERTAMA BIDANG TRANTIBUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menyusun dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah menyusun dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	90
2.	Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kerja	Jumlah menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kerja	Laporan	50
3.	Menyiapkan bahan, menyusun rencana operasi, menyiapkan personil serta sarana dan prasarana operasi yustisi	Jumlah menyiapkan bahan, menyusun rencana operasi, menyiapkan personil serta sarana dan prasarana operasi yustisi	Laporan	80
4.	Menghimpun dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah menghimpun dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Laporan	45


Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001

Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja



NINA RAHMAIDA, S.I.P
Penata Muda / III a
NIP. 19960426 202202 2 003

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD
10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD

11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat

Pranata Trantibum




HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001

WAHYUDINOR
Penata Muda / III a
NIP. 19790511 200604 1 019



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUDINOR

Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HEDY MULYAWAN, M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 19681205 199002 1 001

Paringin, Januari 2025

Pihak Pertama

WAHYUDINOR

Penata Muda / III a

NIP. 19790511 200604 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 19681205 199002 1 001

Parangin, Januari 2025

Pranata Trantibum



WAHYUDINOR

Penata Muda / III a

NIP. 19790511 200604 1 019

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD
10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD

11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 19681205 199002 1 001

Pranata Trantibum



ZAINAL MURSALIN

Penata Muda / III a

NIP. 19720303 200604 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINAL MURSALIN

Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

HEDY MULYAWAN, M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 19681205 199002 1 001

Pihak Pertama

ZAINAL MURSALIN

Penata Muda / III a

NIP. 19720303 200604 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001

Paringin, Januari 2025

Pranata Trantibum



ZAINAL MURSALIN
Penata Muda / III a
NIP. 19720303 200604 1 012

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	SKPD
2	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	SKPD
3	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	SKPD
4	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	SKPD
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	SKPD
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain	SKPD

	diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	
--	---	--	--	--

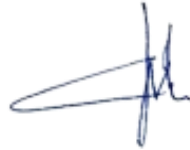
Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat

Penelaah Teknis Kebijakan



HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001



RAHMATULLAH, S.AP
Penata Muda / III a
NIP. 19850921 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMATULLAH, S.AP
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001

Paringin, Januari 2025

Pihak Pertama

RAHMATULLAH, S.AP
Penata Muda / III a
NIP. 19850921 200604 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
BIDANG KETENTRAMAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Dokumen	24
2.	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Dokumen	24
3.	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
4.	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	24

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan

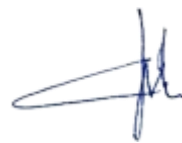
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 19681205 199002 1 001



RAHMATULLAH, S.AP

Penata Muda / III a

NIP. 19850921 200604 1 004

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD
10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD

11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat

Pranata Trantibum



HEDY MULYAWAN, M.Pd
Pembina / IV a
NIP. 19681205 199002 1 001



AHMAD FAUZI
Penata Muda / III a
NIP. 19670415 200701 1 041



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FAUZI

Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEDY MULYAWAN, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

HEDY MULYAWAN, M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 19681205 199002 1 001

Pihak Pertama

AHMAD FAUZI

Penata Muda / III a

NIP. 19670415 200701 1 041

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat



HEDY MULYAWAN, M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 19681205 199002 1 001

Paringin, Januari 2025

Pranata Trantibum



AHMAD FAUZI

Penata Muda / III a

NIP. 19670415 200701 1 041

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
AHLI PERTAMA-POLISI PAMONG PRAJA PADA BIDANG SUMBER DAYA
APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan penindakan yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	SKPD
2	Melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	Jumlah melaksanakan persiapan tindakan Non Yustisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar penegakan perda dan ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum berjalan dengan baik dan benar	SKPD
3	Menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah menyiapkan bahan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	SKPD
4	Menyiapkan bahan pembuatan rencana	Jumlah menyiapkan bahan pembuatan	Jumlah menyiapkan bahan pembuatan	SKPD

	<p>induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	<p>rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	<p>rencana induk (Master Plan) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perda dan trantibum linmas berjalan dengan baik</p>	
5	<p>Melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melakukan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	SKPD
6	<p>Melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	<p>Jumlah melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	<p>Jumlah melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar keselamatan Tamu VIP dan VVIP terjaga</p>	SKPD
7	<p>Melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	<p>Jumlah melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	<p>Jumlah melakukan pengendalian massa sesuai Standar Operasional Prosedur agar massa terkendali dan tidak anarkis</p>	SKPD
8	<p>Melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah melaksanakan deteksi dini berdasarkan Standar Operasional Prosedur agar ketentaraman masyarakat dan ketertiban umum terjaga dengan baik</p>	SKPD
9	<p>Menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta</p>	<p>Jumlah menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan</p>	<p>Jumlah menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta</p>	SKPD

menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan tahun berjalan agar pelaksanaan peranserta masyarakat di bidang trantibum dan linmas meningkat	
---	--	---	--

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja

SYAIFULLAH, SP.

Pembina/ IV a

NIP. 19711017 200112 1 001

M. IKHWAN RIZANI, S.H

Penata Muda / III a

NIP. 19951219 202202 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.IKHWAN RIZANI, S.H
Jabatan : Ahli Pertama – Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, SP.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua

SYAIFULLAH, SP.

Pembina / IV a

NIP. 19711017 200112 1 001

Pihak Pertama

M. IKHWAN RIZANI, S.H

Penata Muda / III a

NIP. 19951219 20220

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
AHLI PERTAMA POLISI PAMONG PRAJA
BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	Jumlah terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	Kegiatan	10
2.	Melaksanakan rapat internal dan eksternal	Jumlah melaksanakan rapat internal dan eksternal	Laporan	120
3.	Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan, pembinaan, motivasi dan pemecahan permasalahan terkait pelaksanaan tugas	Jumlah melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan, pembinaan, motivasi dan pemecahan permasalahan terkait pelaksanaan tugas	Laporan	50
4.	Melaksanakan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah melaksanakan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Laporan	20

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Ahli Pertama-Polisi Pamong Praja



SYAIFULLAH, SP.
Pembina/ IV a
NIP. 19711017 200112 1 001



M. IKHWAN RIZANI, S.H
Penata Muda / III a
NIP. 19951219 202202 1 001

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD
10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD

11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Pranata Trantibum

SYAIFULLAH, SP.

Pembina/ IV a

NIP. 19711017 200112 1 001

EDY ERMANSYAH

Penata Muda / III a

NIP. 19860707 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY ERMANSYAH

Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, SP.

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SYAIFULLAH, SP.

Pembina / IV a

NIP. 19711017 200112 1 001

Paringin, Januari 2025

Pihak Pertama

EDY ERMANSYAH

Penata Muda / III a

NIP. 19860707 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur



SYAIFULLAH, SP.

Pembina/ IV a

NIP. 19711017 200112 1 001

Paringin, Januari 2025

Pranata Trantibum



EDY ERMANSYAH

Penata Muda / III a

NIP. 19860707 200604 1 00

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD
10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD

11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Pranata Trantibum

SYAIFULLAH, SP.

LILIANSYAH

Pembina/ IV a

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 19711017 200112 1 001

NIP. 19671231 198803 1 045



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILIANSYAH
Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, SP.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SYAIFULLAH, SP.

Pembina / IV a

NIP. 19711017 200112 1 001

Paringin, Januari 2025

Pihak Pertama

LILIANSYAH

Penata Muda / III a

NIP. 19671231 198803 1 045

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur



SYAIFULLAH, SP.

Pembina/ IV a

NIP. 19711017 200112 1 001

Pranata Trantibum



LILIANSYAH

Penata Muda TK. I / III b

NIP. 19671231 198803 1 045

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD
10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD

11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Pranata Trantibum



SYAIFULLAH, SP.

Pembina/ IV a

NIP. 19711017 200112 1 001



FAHRIANTO

Penata Muda / III a

NIP. 19720310 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHRIANTO
Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, SP.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


SYAIFULLAH, SP.

Pembina / IV a
NIP. 19711017 200112 1 001

Paringin, Januari 2025

Pihak Pertama


FAHRIANTO

Penata Muda / III a
NIP. 19720310 200604 1 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM
BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Pranata Trantibum



SYAIFULLAH, SP.

Pembina/ IV a

NIP. 19711017 200112 1 001



FAHRIANTO

Penata Muda / III a

NIP. 19720310 200604 1 015

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD

10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD
11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Penelaah Teknis Kebijakan



LUTFHIYADI, S.SOS
Pembina / IV a
NIP. 19670616 200701 1 036



AKHMAD RIYANTO, S.Sos
Penata Muda / III a
NIP. 19830212 200701 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD RIYANTO, S.Sos

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFHIYADI, S.SOS.

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parangin, Januari 2025

Pihak Kedua

LUTFHIYADI, S.SOS

Pembina / IV a

NIP. 19670616 200701 1 036

Pihak Pertama

AKHMAD RIYANTO, S.Sos

Penata Muda / III a

NIP. 19830212 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALANGAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Jumlah mengumpulkan data penelaahan kebijakan teknis dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengelompokan data;	Dokumen	24
2.	Mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Jumlah mengklasifikasikan data penelaahan kebijakan teknis sesuai dengan pedoman kerja, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;	Dokumen	24
3.	Menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah menelaah data kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
4.	Merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Jumlah merekomendasikan hasil telaah kebijakan teknis sesuai dengan petunjuk teknis, agar kegiatan berjalan lancar ;	Laporan	24
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.	Jumlah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan	24
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	24

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat



LUTFHIYADI, S.SOS
Pembina / IV a
NIP. 19670616 200701 1 036

Paringin, Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



AKHMAD RIYANTO, S.Sos
Penata Muda / III a
NIP. 19830212 200701 1 006

INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD
10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD

11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

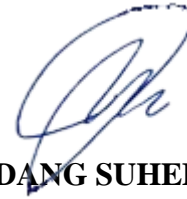
Paringin, Januari 2025

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Pranata Trantibum



LUTFHIYADI, S.SOS
Pembina / IV a
NIP. 19670616 200701 1 036



DADANG SUHERMANTO
Penata Muda / III a
NIP. 19700324 200604 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DADANG SUHERMANTO

Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFHIYADI, S.SOS.

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

LUTFHIYADI, S.SOS

Pembina / IV a

NIP. 19670616 200701 1 036

Parangin, Januari 2025

Pihak Pertama

DADANG SUHERMANTO

Penata Muda / III a

NIP. 19700324 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat



LUTFHIYADI, S.SOS
Pembina / IV a
NIP. 19670616 200701 1 036

Parangin, Januari 2025

Pranata Trantibum



DADANG SUHERMANTO
Penata Muda / III a
NIP. 19700324 200604 1 005

**INDIKATOR KERJA INDIVIDU
PRANATA TRANTIBUM PADA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN**

1. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jabatan : Pranata Trantibum
 3. Tugas : Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Uraian Tugas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	SKPD
2	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	SKPD
3	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	SKPD
4	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	SKPD
5	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	SKPD
6	Melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	Jumlah melakukan Evaluasi Kegiatan	SKPD
7	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patrol	Jumlah melakukan patrol	SKPD
8	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	SKPD
9	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	SKPD

10	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	Jumlah melaksanakan deteksi dini	SKPD
11	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	Jumlah melakukan mobilisasi linmas	SKPD
12	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	SKPD

Parangin, Januari 2025

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Pranata Trantibum



LUTFHIYADI, S.SOS
Pembina / IV a
NIP. 19670616 200701 1 036



ABDUL KADIR
Pengatur / II c
NIP. 19680516 200701 1 030

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL KADIR
Jabatan : Pranata Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFHIYADI, S.SOS.
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Januari 2025

Pihak Kedua



LUTFHIYADI, S.SOS
Pembina / IV a
NIP. 19670616 200701 1 036

Pihak Pertama



ABDUL KADIR
Pengatur / II c
NIP. 19680516 200701 1 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA TRANTIBUM BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Jumlah melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda, evaluasi permasalahan penegakan perda, koordinasi penegakan perda, Mengikuti Penyusunan Perda dan Mengikuti sosialisasi Perda	Dokumen	100
2.	Melakukan tindakan yustisi	Jumlah melakukan tindakan yustisi	Dokumen	100
3.	Menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Jumlah menjadi saksi dalam proses penyidikan dan saksi dalam proses persidangan	Dokumen	100
4.	Melakukan tindakan non yustisi	Jumlah melakukan tindakan non yustisi	Dokumen	100
5.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
6.	Menyusun rencana program	Jumlah menyusun rencana program	Dokumen	50
7.	Melakukan patroli	Jumlah melakukan patroli	Dokumen	50
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan	Jumlah melakukan pengamanan dan pengawalan	Dokumen	50
9.	Melakukan pengendalian massa	Jumlah melakukan pengendalian massa	Dokumen	50
10.	Melaksanakan Deteksi Dini	Jumlah melaksanakan Deteksi Dini	Dokumen	100
11.	Melakukan Mobilisasi Linmas	Jumlah melakukan Mobilisasi Linmas	Dokumen	60
12.	Melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Jumlah melakukan Pendataan dan Pelatihan Linmas	Dokumen	100


Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat



LUTFHIYADI, S.SOS
Pembina / IV a
NIP. 19670616 200701 1 036

Paringin, Januari 2025

Pranata Trantibum



ABDUL KADIR
Pengatur / II c
NIP. 19680516 200701 1 030